

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Tahun 2007 Pemerintah telah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat miskin. Program e-Warong adalah program bantuan tunai bersyarat. Memiliki tujuan untuk menambah akses dan kualitas dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan taraf pendidikan anak (keluarga penerima manfaat), mengangkat taraf kesehatan ibu hamil/menyusui dan anak di bawah usia 6 tahun, dan meningkatkan kondisi ekonomi KPM. Program ini berhubungan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, lalu pemerintah memperluas sasaran PKH dan secara bertahap menyalurkan bantuan secara nontunai. (Mawardi et al., 2017)

April Tahun 2016, Presiden Joko Widodo memberikan sebuah masukan untuk jajaran mentrinya mengenai pentingnya untuk menciptakan sistem finansial nasional yang inklusif penyaluran semua bentuk bantuan sosial dan subsidi secara nontunai dengan menggunakan system perbankan untuk memudahkan kontrol dan memantau, menghindari penyimpangan, dan perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos menjadi satu kartu.

Kesejahteraan social yang terdapat dalam UUD 1945 yang diantaranya menyatakan, bahwa perekonomian berdasarkan atas asas kekeluargaan, membiayai pendidikan dasar, serta pengembangan sistem jaminan social bagi

seluruh rakyat Indonesia, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pemerintah Indonesia secara jelas telah diamanatkan untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan orang per orang. Namun kemiskinan merupakan suatu masalah sosial yang tidak dapat dipungkiri lagi yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Khususnya pada masyarakat Negara berkembang masalah kemiskinan menuntut adanya upaya pemecahan masalah yang dilakukan dengan perencanaan dan terintegritas. Terkhusus Kota Depok mempunyai penduduk miskin yang cukup banyak, dapat di lihat di table berikut;

Tabel 1.1

Indikator Kemiskinan di Kota Depok Tahun 2017–2018.

Tahun	Jumlah Penduduk Miskinn (000)	Persentase Penduduk Miskin (%)	P1 (Indeks Kedalamana Kemiskinan)	P2 (Indeks Keparahan Kemiskinan)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/bulan)
2017	52.34	2.34	0.25	0.06	556.470
2018	49.39	2.34	0.31	0.06	615.255

Sumber: Kota Depok Dalam Angka 2017-2018

Secara makro kemiskinan di Kota Depok berada di level yang stagnan. Inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2018 membuat garis kemiskinan meningkat dari Rp. 556.470,- menjadi Rp 615. 255,-. Hal ini tidak membuat jumlah penduduk miskin di Kota Depok bertambah tapi mengalami

penurunan, namun secara presentase tidak mengalami kenaikan maupun penurunan pada tahun 2018 yaitu berada pada level 2.34 persen.

Terkait dengan hal itu permasalahan kemiskinan Kota Depok perlu adanya program untuk penanganan kemiskinan yang disinergikan, agar selanjutnya dapat memberikan dampak yang luas, efektif dan efisien. Dalam hal ini pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Depok mengeluarkan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu program tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yakni program pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan kewajibannya.

Dapat diartikan bahwa munculnya program e-Warong KUBE PKH pada Kota Depok untuk membantu mengetaskan kemiskinan dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu agar lebih sejahtera, serta meringankan beban pengeluaran masyarakat kurang mampu. Sehubungan dengan tujuan tersebut diharapkan program e-Warong KUBE PKH dapat mempermudah masyarakat dalam menyalurkan bantuan-bantuan social tidak lagi dengan menggunakan uang tunai, melainkan dengan menggunakan system perbankan yang dapat mendukung perilaku produktif bagi penerima bantuan. Serta diharapkan juga terciptanya transparansi dan akuntabilitas untuk mengurangi penyimpangan, dan ekonomi masyarakat yang menjalankan program e-Warong KUBE PKH tersebut dapat meningkat

dikarenakan masyarakatlah sebagai pelaku dari program tersebut. Namun, dalam penerapannya program e-Warong KUBE PKH memiliki berbagai macam pandangan baik yang dalam penerapannya berhasil maupun adanya kendala.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan program e-Warong KUBE PKH Berdasarkan Riset Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi terhadap 36 e-Warong dan 180 KPM di Jawa Barat dan Lampung menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai selama Januari-Juni 2017 masih menghadapi kendala yang berkaitan dengan akurasi data, yakni Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sudah pindah ataupun meninggal dan belum adanya kesiapan infrastruktur pendukung (Azizah, “*Bantuan Pangan Nontunai Masih Hadapi Kendala*”, *Bisnis.com*, diakses 24 Januari 2018). Sedangkan penerapan program dari e-Warong KUBE PKH di Kota Depok sendiri telah berjalan 2 tahun lebih terhitung sejak tanggal 9 Januari 2017 yang diluncurkan oleh Dinas Sosial Kota Depok.

Dari penjelasan terkait dengan latar belakang masalah di atas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Evaluasi Program Elektronik Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) Sebagai Pengetasan Kemiskinan di Kota Depok”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Evaluasi Program Elektronik Warong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) Sebagai Pengetasan Kemiskinan di Kota Depok Tahun 2017-2018?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk Mengetahui Bagaimana Evaluasi Program Elektronik Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan (e-Warong KUBE PKH) Sebagai Pengetasan Kemiskinan di Kota Depok

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai program elektronik warung gotong royong.
- b. Sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis di pelajari di dalam bangku perkuliahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah Kota Depok dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan Program Keluarga Harapan, dapat pula dijadikan sebagai masukan bagi pihak Dinas Sosial Kota Depok agar dapat meningkatkan peran

serta kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi berjudul evaluasi program telah banyak dilakukan oleh beberapa mahasiswa namun masing-masing dari mereka memiliki perbedaan secara teoritis, maka dapat ditabelkan sebagai berikut:

No.	Judul	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil	Jurnal Nomer dan Tahun
1.	Pengentasan Kemiskinan melalui Bantuan Sosial Non Tunai Poverty Reduction through Non-Cash Social Assistance	Soetji Andari (2017)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Implementasi program e-Warong KUBE PKH pada Dinas Sosial Kota Medan sudah optimal, dalam hal ini program e-Warong KUBE PKH di Kota Medan khususnya Medan Denai dan Amplas telah memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan.	Jurnal PKS Vol 16 No 4
2.	ECONOMIC EMPOWERMENT THROUGH INCOME GENERATING of e-WARONG KUBE	Komang Monday Sari (2018)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Penerima bantuan PKH ingin melakukan dan memenuhi semua komitmentnya karena sudah ada sanksi yang diberlakukan, berdasarkan data yang ada dan telah diketahui bahwa setiap tahunnya peserta PKH	Jurnal of Economic Empowerment Strategy (JEES) Vol. 01, Number 01 Tahun 2018

				mengalami penurunan. Terbukti dengan jumlah peserta PKH dari 692 Tahun 2009 dan pada setiap tahunnya mengalami penurunan sampai pada tahun 2013 ini dengan jumlah 528.	
3.	Jaringan Sosial e-Warong Kube dan PKH dalam penanganan Kemiskinan pada e-Warong Cahaya Dini Kota Pekanbaru	Ayu Diah Amalia (2018)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Setiap tahunnya jumlah peserta PKH di desa Beji mengalami penurunan. Dari tahun ketahun sampai pada tahun 2014 ini dengan jumlah 130. Hal ini membuktikan dengan adanya bantuan PKH tersebut tidaknya akan mengurangi angka kemiskinan.	Sosio Informa Vol 4 No 1 Tahun 2018
4.	Peran Dinas Sosial Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Elektronik Warung Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan Kota Malang	Antonius Richardo Ratu Da Costa, Ignatius Adiwidjaja (2018)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	PKH pendidikan memberikan dampak besar terhadap akses dan tingkat kehadiran anak-anak RTSM di layanan pendidikan. Karena pendamping selalu mengontrol tingkat kehadiran anak-anak disekolah melalui vertifikasi absen yang telah dilakukan oleh guru masing-masing sekolah.	JISIP Vol 7 No. 1 Tahun 2018

5.	Perbaikan Pelayanan e-Warong Bandung Menggunakan Metode Quality Function Development (QFD)	Ivan, Husni DKK (2018)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Menyatakan bahwasannya mempunyai dampak negative dan positif. Untuk positif yaitu mengurangi beban RTSM untuk meneruskan pendidikan anak-anaknya dan juga anak-anak dari RTSM yang sedari awal malas sekolah sekarang sudah menunjukkan proses yang baik karena adanya bantuan dari PKH ini. Sedangkan ada negativenya yaitu bantuan belum tepat sasaran, karna malah ada beberapa masyarakat yang jadi ketergantungan dengan adanya bantuan ini dan menjadi tidak berkembang.	ISSN Vol. 5 No. 2 Tahun 2018
6.	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Desa Kendahe II Kecamatan Kendahe	Sri Marista Luluhang (2015)	Deskriptif pendekatan kualitatif	Program Keluarga Harapan di Desa Kendahe II masih belum tepat sasaran dan belum mencakup semua rumah tangga miskin. Sehingga program keluarga harapan tidak	Prosiding KS: Riset & KPM Vol 4 Nomer 1 Tahun 2017

	Kabupaten Sangihe			memberikan dampak yang signifikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Desa Kendahe II.	
7.	Potensi Pengembangan Elektronik Warung Gotong Royong (e-Warong) KUBE PKH Sebagai Alternatif Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tenggara	Septilia Okky Susanti dkk (2016)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Masyarakat penerima manfaat sudah mudah untuk melakukan pembelian kebutuhan sehari hari dikarenakan e-Warong berada untuk melakukan pencairan dana bantuan sudah ada yang mengatur oleh masing dari KUBE jasa untuk mendapatkan efisiensi. Namun masyarakat yang tergabung dalam PKH ini mudah merasakan puas dengan adanya program yang sudah diberikan pemerintah tanpa adanya usaha dari dalam diri untuk membuat suatu usaha mengembangkan bantuan tersebut.	ETNOREFLIKA Vol 6 No. 2 Tahun 2017
8.	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Rumah Tangga	Syahputra Adisanjaya Suleman dkk (2017)	Deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Program Keluarga Harapan merupakan yang bersifat memberikan bantuan langsung tunai pada masyarakat, memiliki	JAP Vol 2 Nomer 1 Tahun 2017

	Miskin			<p>upaya untuk kualitas kehidupan meningkat melalui akses pendidikan anak dan kesehatan.</p> <p>Berdasarkan sudut pandang kesejahteraan social dapat difahami bahwa PKH memang belum tepat jika disebutkan sebagai sebuah program pengetasan kemiskinan.</p> <p>Dipandang sebagai program perlindungan social PKH ini dapat dikatakan tepat namun belum terukur efektifitas pelaksanaannya.</p>	
9.	<p>Pengetasan Kemiskinan Melalui Bantuan Sosial Non Tunai</p> <p><i>Poverty Reduction Through Non-Cash Social Assistance</i></p>	<p>Soetji Andari (2017)</p>	<p>Kualitatif dengan metode wawancara</p>	<p>Kegiatan persiapan pelaksanaan e-Warong belum matang, karena tidak ada kelengkapan regulasi e-Warong yaitu pedoman umum, petunjuk bisnis operasional dan kejelasan kerjasama antar pihak. Selain tentang regulasi yang belum jelas, penerapan e-Warong KUBE PKH kedepannya membutuhkan persyaratan terkait</p>	<p>Jurnal PKS Vol 16 No 4 Tahun 2017</p>

				dalam infrastruktur dan pemantapan organisasi, pengelolaan yang berfungsi sebagai titik distribusi bantuan social non tunai, agen bank, penerima manfaat, serta mekanisme pemantuan dan evaluasi yang efektif.	
10.	E-Warong Sebagai Salah Satu Solusi Mengetaskan Kemiskinan Masyarakat	Maya Yusnita, Dewi Agustina dkk	Kualitatif dengan metode wawancara dan observasi	Pemberdayaan ekonomi melalui pendapatan generasi operator e-Warong KUBE di Kota Cimahi masih belum teralisasi secara optimal. Ini dapat diilustrasikan dalam beberapa kategori: pelatihan UEP pertama yang belum terwujud bias dilihat dari variasi bisnis dan jenisnya bisnis yang dikembangkan oleh e-Warong masih terbatas dalam distribusi hanya dari BPNT. Keduanya mengakses keuangan lembaga belum terwujud, sumber keuangan dari KUB e-Warong masih bersumber dari	Proceeding of Community Development Vol 1 Tahun 2017

				bantuan modal disediakan oleh pemerintah. Ketiga implementasi pembinaan berkelanjutan telah dilakukan tatapi PKH fasilitator masih terbatas sehingga salah satunya pendukung PKH mengawasi 2 e- Warong KUBE di Kota Cimahi.	
--	--	--	--	---	--

Dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu membahas tentang E-Warong Kube PKH. Dalam penelitian terdahulu membahas bagaimana penerapan sebuah program E-Warong dalam lingkup kecamatan hal ini dilakukan guna melihat efektifitas maupun efisiensi sebuah program yang sudah diterapkan. Efektifitas dalam penerapan sebuah program dapat terlihat dari tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, jika sebuah program semakin mendekati sasaran, berarti semakin tinggi efektifitasnya. Kegagalan yang terjadi dikarenakan masih kurangnya masyarakat yang melek akan teknologi berbasis online, selain itu tidak ada kelengkapan regulasi program seperti pedoman umum, petunjuk bisnis operasional dan kejelasan antar pihak yang berkaitan. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan dengan metode kualitatif.

Perbedaan dalam penelitian dengan penelitian terdahulu adalah lebih mengacu kepada Evaluasi Program E-Warong dalam pengetasan kemiskinan di Kota Depok. Lokasi juga menjadi salah satu perbedaan dalam penelitian ini. E-Warong Kube PKH ini salah satu hal yang menarik diteliti karena program ini termasuk terobosan terbaru dari pemerintah untuk memecahkan permasalahan kemiskinan.

1.6 KERANGKI TEORI

1.6.1 Evaluasi Program

Terdapat beberapa macam definisi dan evaluasi yang telah di kemukakan oleh beberapa ahli. Menurut Fathoni (2016), menyatakan secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa inggris evaluation, dalam bahasa Indonesia berarti penilaian. Asal katanya adalah value yang berarti nilai dari sebuah kegiatan. Sedangkan menurut Rinda Hedwig (2006) mengungkapkan bahwa proses yang dilakukan secara konsisten untuk menjaga proses pengawasan (monitoring) dan evaluasi secara internal yaitu pada proses yang memuat kegiatan audit, penilaian dan evaluasi.

Menurut ziervogel (2008), evaluasi adalah sebuah kegiatan penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan saat proyek selesai dilaksanakan ataupun saat sedang berjalan. Dengan tujuan melihat relevansi dari pemenuhan tujuan, pengembangan efisiensi,

efektifitas hingga dampak yang berkelanjutan. Kegiatan evaluasi ini memberikan informasi yang kredibel atau dapat dipercaya sebagai proses penentuan nilai. Penilaian ini menggunakan standar yang tepat untuk pemeriksaan kinerja suatu program atau kegiatan.

Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas, selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternative-alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan tersebut telah tercapai. (Purwanto, 2002)

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternative yang tepat dalam pengambilan keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.

Evaluasi menurut Kaihatu bahwa evaluasi adalah kegiatan yang dapat menentukan nilai maupun seberapa penting sebuah kegiatan, program, atau suatu program (Kaihatu, 2006). Evaluasi ada

sebuah proses penilaian yang subyektif dan sistematis mungkin terkait dengan sebuah tekanan yang direncanakan atau tengah berlangsung yang telah diselesaikan. Hal-hal yang semestinya dievaluasi yaitu berupa program, proyek, kebijakan, sektor, organisasi, tematik, serta bantuan Negara.

Menurut Yuanda pengertian evaluasi adalah kegiatan yang dalam pelaksanaannya direncanakan untuk dapat menentukan keadaan sebuah objek dengan menggunakan instrument serta hasilnya dapat dibandingkan dengan suatu patokan untuk kemudian menjadi kesimpulan (Yuanda dalam Sapitri, 2014). Sementara menurut Griffin & Nix menyatakan bahwa evaluasi biasanya didahului oleh suatu penilaian (assessment), sedangkan penilaian di dahului dengan pengukuran, dimana pengukuran diartikan sebagai suatu kegiatan guna membandingkan pengamatan dengan sebuah kriteria penilaian (assessment) yang ada (griffin & Nix dalam Widoyoko, 2005). Kriteria penilaian yang dimaksud yaitu kegiatan untuk menafsirkan serta menggambarkan hasil dari suatu pengukuran, sedangkan evaluasi digunakan guna menentukan suatu nilai serta implikasi dari perilaku.

Menurut Afriani (2017) evaluasi mempunyai pengertian yang berhubungan atau masing-masing- menunjukkan pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan ataupun program. Serta

dapat disamakan dengan penafsiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessment), kata-kata yang menyatakan usaha dalam menganalisis hasil kebijakan mengenai artu satuan nilainya.

Menurut Arikunto mengatakan bahwa evaluasi adalah proses penggambaran, mencari serta memberikan informasi yang sangat berguna untuk pengambil keputusan dalam menentukan alternative keputusan tersebut (Arikunto, 2010). Maka evaluasi diartikan sebagai suatu proses penilaian terhadap pentingnya suatu kegiatan ataupun kebijakan sehingga kita dapat membandingkan apakah kegiatan atau kebijakan yang telah dibuat sudah efektif ataupun efisien. Evaluasi juga memberikan gambaran mengenai informasi yang telah diperoleh sehingga keputusan akhir dapat ditentukan. Winarmo (2013) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan tahap akhir dari sebuah siklus bijakan. Secara umum dapat diartikan sebagai tahap penilaian dari hasil kinerja pegawai atau karyawan suatu organisasi. Sejalan dengan ini proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisa hasilnya. Evaluasi perbandingan yang dilakukan atau tujuan yang hendak dicapai untuk penyelesaian masalah dengan hasil atau kejadian yang sebenarnya terjadi.

Menurut Dunn evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan penilaian (assessment), kata-

kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kinerja dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan (Dunn, 2003).

Jadi dapat disimpulkan evaluasi adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menilai dan menentukan sebuah ukuran suatu program kegiatan telah tepat sasaran atau telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.

1.6.2 Prinsip-Prinsip Evaluasi

Prinsip-prinsip evaluasi, menurut Fatah dalam Samuel (2008), mengemukakan ada 6 prinsip, yaitu:

1. Prinsip berkelanjutan, yang artinya dilakukan secara berlanjut.
2. Prinsip menyeluruh, yang artinya keseluruhan aspek dan komponen program harus di evaluasi.
3. Prinsip bersifat obyektif, yang artinya pelaksanaannya bebas dari kepentingan pribadi.
4. Prinsip valid, yang artinya mengandung konsistensi yang benar-benar mengukur yang seharusnya diukur.
5. Prinsip pengguna yang kritis.

6. Prinsip yang memperhatikan kegunaan dan manfaat.

Menurut (Kusek & Rist, 2004) mengemukakan beberapa tujuan dari evaluasi diantaranya:

1. Membantu pembuatan keputusan alokasi sumber daya
2. Membantu memikirkan kembali sebuah penyebab dari permasalahan
3. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan daruratu
4. Memberi support kepada pengambil keputusan untuk bersaing dan memberikan cara-cara alternative terbaik
5. Memberi dukungan terhadap inovasi dan reformasi sector public
6. Membangun sebuah consensus pada akar masalah dan cara menanggapi.

Menurut (Kusek & Rist, 2004) ada beberapa tipe evaluasi, yaitu:

1. Performance Logic Chain Assessment

Model evaluasi seperti ini digunakan untuk menentukan kekuatan dari program, kebijakan dan proyek.

2. Evaluasi Pre Implementation assessment

Strategi evaluasi Pre-implementation assessment menunjuk pada tiga standar khusus yang harus diartikulasikan secara jelas sebelum seorang pemimpin bergerak ke fase implementasi.

3. Process Implementation Evaluation

Focus dari evaluasi pada proses implementasi adalah sebuah detail dari implementasi yang dilaksanakannya. Apa saja yang sudah diimplementasikan atau belum diimplementasikan dari sebuah rencana.

4. Rapid Appraisal

Metode Rapid Appraisal bisa dikarakteristikan menjadi sebuah metode kompleks dengan berbagai pendekatan metode evaluasi yang menggunakan koleksi data berupa angka-angka. Metode ini membutuhkan informasi yang cepat dalam jangka waktu yang sesuai tapi relative murah anggaran yang digunakan.

5. Case Study

Metode ini biasanya digunakan ketika seorang pemimpin membutuhkan sebuah informasi mendalam untuk memahami secara jelas apa yang terjadi terhadap sebuah kebijakan, program, atau proyek.

6. Impact Evaluation

Metode ini mencoba untuk menentukan prosi dari dampak sebuah dokumen, penyebab intervensi, dan kemungkinan apa yang dating dari kegiatan atau kondisi lainnya.

7. Menetapkan sebuah kriteria dan prosedur-prosedur untuk sebuah jalur sistematis bagi evaluasi-evaluasi yang ada untuk memandang kedepan demi menyimpulkan sebuah trend dan menghasilkan sebuah kepercayaan diri dalam penemuan studi yang lain.

Kriteria evaluasi harus memuat nilai-nilai evaluasi menurut Hamilton & Ziervogel (2008) sebagai berikut:

1. Standar tinggi etika professional

Nilai lebih dikenal dengan kode etik umum yang harus diatasi oleh setiap pegawai negeri dari suatu instansi pemerintah. Penerapan nilainya dimulai dari input hingga output dari suatu program yang dijalankan dan di dalamnya berisikan evaluasi etika, pengelolaan konflik kepentingan, etika tugas dan tanggung jawab, mekanisme pelaporan perilaku yang tidak etis, pelatihan etika, penyaringan sebelum kerja, sehingga nantinya dapat terlihat perilaku

professional dan etis dalam kinerja personil dari Pegawai Negeri tersebut.

2. Efisiensi

Nilai ini diterapkan untuk mengolah sumberdaya agar berdaya guna dan tepat, terutama dalam hal biaya program. Adapun dalam penilaiannya berisikan tentang hasil perencanaan, pelaksanaan, pencapaian, pembiayaan yang digunakan dalam pelaksanaan.

3. Efektifitas

Nilai ini digunakan untuk melihat seberapa baik output dan outcome dari tujuan program yang dicapai dan seberapa sesuai output dengan hasil yang diinginkan. Ukuran efektivitas untuk suatu organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria adapun kriteria tersebut yaitu, input, proses produksi, output dan produktivitas.

4. Berorientasi Pada Pembangunan

Dalam prakteknya, suatu program harus berorientasi dalam pembangunan hal ini berarti bahwa setiap hari kegiatan administrasi public harus berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung dan masyarakat tidak mampu.

5. Pelayanan Tak Memihak

Pelayanan atau program yang diberikan haruslah menjunjung persamaan hak dan keadilan, pemerintah harus menjamin bahwa semua pihak, tanpa terkecuali, dilibatkan dan menikmati proses pelayanan kegiatan, tanpa ada satu pihakpun yang dikesampingkan.

6. Bertanggung jawab

Merupakan nilai kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu instansi pemerintah untuk bertanggungjawab dalam keberhasilan serta kegagalan sebuah program yang dilaksanakan.

7. Akuntabilitas

Nilai ini merupakan aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan sebagai penanggungjawab dari semua tindakan yang dilakukan dalam program dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Indikator akuntabilitas yaitu akuntabilitas hukum, akuntabilitas proses, dan akuntabilitas program.

8. Transparansi

Pelayanan program pemerintahan yang baik akan bersifat terbuka dan akurat terhadap masyarakatnya. Nilai juga membuka peluang bagi masyarakat untuk memberikan atau mengusulkan sebuah pendapat atau kritikan terhadap

pemerintah yang dirasa kurang terbuka atau transparan. Transparan dapat diukur melalui indikator sebagai berikut keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

9. Dilaksanakan oleh SDM yang baik dan mampu

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dipilih dengan baik akan memudahkan program yang dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi manusia tersebut.

10. Adminitrasi public dapat mewakili kalangan luas

Meskipun terdapat kepentingan yang berbeda dalam tujuan pelayanan program akan tetapi intinya tetap berorientasi pada perawakilan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

Menurut Dunn (Nugroho, 2009) menjelaskan tentang indicator-indicator untuk melakukan tahapan evaluasi terhadap suatu kebijakan yakni:

1. Efektifitas; apakah hasil yang diinginkan telah dicapai?
2. Efisiensi; seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan?
3. Kecukupan; seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah?

4. Perataan; apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda?
5. Responsivitas; apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok tertentu?
6. Ketepatan; apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai?

1.6.3 Program Keluarga Harapan

Buku Saku Pendamping PKH menjelaskan Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program yang memberikan bantuan tunai bersyarat yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan dan kesehatan.

Kajian PKH atau disebut Program keluarga Harapan menyatakan tujuan yang bersifat penting yaitu untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan memutuskan kemiskinan meningkatkan kualitas SDM, untuk dapat merubah kebiasaan yang tidak sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat paling miskin. Hal ini, ada kaitannya langsung dengan upaya mempercepat pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs). Selain hal tersebut, memiliki beberapa tujuan lain dari PKH ini baik secara khusus maupun secara umum.

Tujuan khusus PKH, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM.
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.

Tujuan umum PKH, yaitu:

Menambahkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku peserta PKH yang relatif tidak mendukung peningkatan kesejahteraan. Dalam buku pedoman umum Program Keluarga Harapan menjelaskan bahwa PKH ini tidak sama dan bukan merupakan lanjutan dari program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah berlangsung sejauh ini dalam bentuk membantu masyarakat miskin mempertahankan daya beli saat pemerintah sedang melakukan penyesuaian harga BBM. Program ini dimaksudkan dalam bentuk upaya membangun system perlindungan sosial untuk masyarakat miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup sekaligus sebagai bentuk pemerintah untuk memutuskan rantai kemiskinan yang telah terjadi selama ini, berdasarkan dalam pengamalan Negara-negara lain, program serupa seperti PKH ini sangat berguna bagi masyarakat miskin. Memiliki tujuan khusus tersebut diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bagi peserta PKH.

Berdasarkan Buku Pedoman Umum Keluarga Harapan tahapan dalam pelaksanaan PKH meliputi:

1. Penetapan sasaran
2. Validasi
3. Pembayaran Pertama
4. Pemutakhiran Data
5. Vertifikasi
6. Pembayaran Tahap Selanjutnya
7. Transformasi (resertifikasi, transisi dan graduasi) untuk mendukung bisnis proses diatas, dilakukan kegiatan:

1. Koordinasi
2. Sosialisasi
3. Rekrutmen
4. Pelatihan
5. Rapat koordinasi (Pusat, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota)
6. Bimbingan teknis Pendamping/Operator (regular) dan Penyedia Layanan (service provider)
7. Pengaduan Masyarakat
8. Monitoring dan Evaluasi
9. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)

Selanjutnya dalam Buku Saku Pendamping PKH menyebutkan bahwa sasaran PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM/KSM) atau kelompok masyarakat yang berdomisili di lokasi terpilih yang memiliki satu atau beberapa kriteria:

1. Mempunyai anak SD/Madrasah Ibtidaiyah/Sederajat
2. Memiliki anak SMP/Madrasah Tsanawiah/Sedarajat
3. Mempunyai anak usia 7-18 tahun yang belum menamatkan pendidikan dasar
4. Memiliki ibu hamil/melahirkan/nifas, dan atau
5. Memiliki balita
6. Memiliki anak usia 5-7 tahun (anak pra sekolah)

Kemudian dalam Buku Pedoman Umum Program Keluarga Harapan menerangkan bahwa setiap Penerima PKH diberikan kartu sebagai bukti kepesertaan. Nama yang tercantum dalam kartu peserta PKH RTSM adalah perempuan dewasa (ibu, nenek, bibi dan anak perempuan dewasa) yang mengurus RTSM. Sedangkan nama yang tercantum dalam kartu peserra PKH KSM adalah perempuan dewasa (ibu dan anak perempuan dewasa). Dalam kondisi tertentu dapat digunakan untuk menerima bantuan PKH dan bantuan social lainnya.

Dijelaskan dalam Buku Saku Pendamping PKH bahwa dalam menjalankan PKH, peserta untuk mematuhi ketentuan PKH (sesuai dengan yang tercantum dalam pedoman umum) sebagai berikut:

1. Memeriksa kandungan bagi ibu hamil ke fasilitas kesehatan sesuai protocol pelayanan kesehatan dasar.
2. Melakukan pemeriksaan pasca persalinan untuk ibu nifas sesuai dengan protokol pelayanan kesehatan dasar.
3. Mengantarkan anak usia balita ke fasilitas kesehatan sesuai dengan protocol pelayanan kesehatan dasar.
4. Mengantarkan anak usia pra-sekolah ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
5. Mendaftarkan dan menyekolahkan anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

1.7 Definisi Konseptual

1.7.1 Evaluasi Program

Evaluasi adalah sebuah kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menilai dan menentukan sebuah ukuran suatu program kegiatan telah tepat sasaran atau telah mencapai tujuan yang diinginkan atau belum.

1.7.2 Program Keluarga Harapan

Berdasarkan kajian Program Keluarga Harapan memiliki tujuan utama yaitu untuk dapat mengurangi ataupun dapat memutus sebuah rantai kemiskinan yang terjadi selama ini dan meningkatkan kualitas SDM..

1.8 Definisi Operasional

Definisi operasional dari penelitian ini digunakan untuk menggambarkan secara jelas pengertian sesuai dengan definisi konsep yang ada. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses evaluasi Program E-Warong KUBE PKH di Kota Depok. Definisi operasional yang digunakan oleh penulis merujuk pada teori Dunn (dalam Muhammad Firyal Akbar, 2016) terkait indikator-indikator dalam evaluasi. Adapun indikator yang digunakan adalah:

1. Efektifitas

Program E-Warong Kube-PKH sudah sesuai dengan kriteria yang akan dicapai atau belum.

2. Efisiensi

Seberapa banyak usaha yang diberikan dari Dinas Sosial Kota Depok untuk E-Warong Kube-PKH.

3. Kecukupan

Program E-Warong Kube-PKH sudah dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Depok.

4. Pemerataan

Program E-Warong Kube-PKH sudah mendistribusikan manfaat bantuan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan.

5. Responsivitas

Program E-Warong Kube-PKH sudah memuaskan bagi masyarakat penerima bantuan.

6. Ketepatan

Program E-Warong Kube-PKH berguna bagi masyarakat penerima bantuan

1.9 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Burhan penelitian social menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas social yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.

Studi deskriptif dalam konteks penelitian ini, meliputi tentang gambaran Evaluasi Program Elektronik Warong Gotong Royong Program Keluarga Harapan untuk pengetasan kemiskinan.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Depok yang berada di Provinsi Jawa Barat Kota Depok. Pemilihan

lokasi tersebut didasarkan efektifitas dan efisiensi dan dikarenakan ingin mengetahui terkait evaluasi program E-Warong KUBE PKH di Kota Depok.

3. Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dan dikumpulkan menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berupa angka, sehingga data yang digunakan harus dijabarkan secara rinci dan jelas agar agar memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, dilakukan pengamatan pada objek yang sedang di teliti. Objek yang diteliti yaitu E-Warong Kube PKH Kota Depok. Data penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut:

a. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang secara langsung (Sugiyono, 2014). Sumber data primer ini dapat dengan proses wawancara kepada narasumber yang sesuai dengan penelitian. Data primer dilakukan dengan melakukan wawancara masyarakat yang tergabung dalam program keluarga harapan, Dinas Sosial Kota Depok, dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

Tabel 1.2

Data Primer Penelitian

No	Nama Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
1	Program E-Warong Kube-PKH sudah sesuai dengan kriteria yang akan dicapai atau belum	Ibu Asri (Kasi Jaminan Sosial)	Wawancara
2	Seberapa banyak usaha yang diberikan dari Dinas Sosial Kota Depok untuk program E-Warong Kube-PKH	Ibu Asri (Kasi Jaminan Sosial)	Wawancara
3	Program E-Warong Kube-PKH sudah dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Kota Depok	Ibu Asri (Kasi Jaminan Sosial), Ibu Nur (Anggota Kube-PKH) dan Ibu Sugi (KPM)	Wawancara
4	Program E-Warong Kube-PKH sudah mendistribusikan manfaat bantuan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan	Ibu Nuri dan Ibu Dian (Pendamping e-Warong KUBE PKH)	Wawancara
5	Program E-Warong Kube-PKH sudah memuaskan bagi masyarakat penerima bantuan	Ibu Sugi (KPM)	Wawancara
6.	Program E-Warong Kube-PKH berguna bagi masyarakat penerima bantuan.	Ibu Septi (KPM)	Wawancara

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber daya yang tidak langsung (Sugiyono, 2014) data yang mendukung untuk melengkapi dari data primer berupa buku, jurnal, website, dan pendukung lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan dan menggunakan berupa buku atau dokumentasi yang berhubungan

dengan penelitian dan data sekunder yang akan digunakan dipaparkan dalam table dibawah ini:

Tabel 1.3

Data Sekunder Penelitian

No	Nama Data	Sumber
1.	Laporan Evaluasi Program E-Warong Kube-PKH	Dinas Sosial Kota Depok
2.	Pedoman Umum Program E-Warong Kube-PKH	Jurnal

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting di dalam penelitian kualitatif secara umum mencakup observasi, wawancara dan analisis dokumen. Peneliti akan menggunakan data untuk validasi temuan (Emzir, 2014). Maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mendapatkan keterangan informasi secara lisan dari sasaran peneliti atau dengan bercakap-cakap berhadapan muka (face to face) langsung dengan orang yang bersangkutan. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

dengan cara wawancara apabila peneliti akan melakukan studi pendahuan yang menemukan permasalahan yang harus diteliti dan peneliti yang ingin tahu hal-hal yang di responden yang mendalam dengan respondennya yang sedikit (Sugiyono, 2014).

Tabel 1.4

Data Narasumber Wawancara

No	Narasumber	Jumlah
1.	Pendamping PKH Kota Depok	1
2.	Anggota E-Warong Kube-PKH	2
3.	Koordinator Wilayah PKH Jawa Barat 1	1
4.	Masyarakat Penerima Bantuan	5
5.	Dinas Sosial Kota Depok	1
	Total	9

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari data atau sebuah karya atau peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar atau dalam bentuk karya monumental dari seseorang untuk menunjang data penelitian (Sugiyono, 2014). Oleh karena itu dokumentasi atau salah satu teknik pengumpulan data penelitian yang sangat diperlukan seperti dokumen-dokumen evaluasi program E-Warong Kube-PKH, dokumen MONEV karena dapat menjadi bukti setiap momen penelitian.

Adapun alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data lapangan diantaranya panduan wawancara (poin-poin pokok wawancara), alat perekam (recorder), buku catatan dan kamera digital.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif yang dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan data. Analisis melalui membaca, meriview atau memilah-memilah data (catatan observasi, transkrip wawancara) untuk mendeteksi tema-tema dan pola-pola yang muncul (Emzir, 2014). Setelah data, maka selanjutnya melakukan pengolahan dan penganalisaan data, proses pengolahan data yang ditujukan untuk menyerdehanakan data agar lebih mudah dianalisis dan diinterpretasikan.

Dalam penelitian tentang evaluasi program E-Warong Kube PKH di Kota Depok, peneliti melakukan tahapan yang akan mempermudah dalam menyusun penelitian yaitu:

Gambar 1.1
Teknik Analisis Data



1. Mempersiapkan permasalahan secara sistematis, permasalahan yang ditemukan akan dikumpulkan dan disusun secara urut dan sistematis agar dapat memberikan kemudahan dalam membahas Evaluasi Program E-Warong Kube-PKH di Kota Depok.
2. Menyiapkan kerangka teori yang berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Evaluasi Program E-Warong Kube-PKH.
3. Penyusunan instrument penelitian, dalam tahapan ini sangat penting untuk diperhatikan oleh penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan pengolahan, pengolahan data memberikan penjelasan lebih focus dalam pembahasan serta mempermudah arah penulis dalam melakukan penelitian.
4. Pengumpulan data primer dengan cara interview dan dokumentasi, penulis melakukan interview untuk mendapatkan data tentang Evaluasi Program E-Warong Kube-PKH, selanjutnya data sekunder digunakan sebagai bahan acuan penelitian.
5. Reduksi data adalah sebuah proses pemilihan, pemusatan perhatian dalam penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang didapat selama melakukan penelitian di Kota Depok. Reduksi data terus berlanjut sampai laporan akhir penelitian lengkap tersusun, oleh sebab itu reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, menyaring yang tidak perlu dan mengorganisir data menjadi sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan

diferifikasi. Dengan reduksi data penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasi dalam berbagai cara.

6. Mengolah data, data yang diperoleh menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
7. Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dengan menyederhanakan informasi, dengan berbentuk table sehingga dapat memperoleh gambaran yang jelas tentang Evaluasi Program E-Warong Kube-PKH.
8. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan konfigurasi untuk selama melakukan penelitian di Kota Depok, sedangkan verifikasi merupakan memikirkan kembali selama pencatatan berlangsung atau peninjauan kembali catatan yang diperoleh selama melakukan penelitian.